



Butir Pemikiran

DEMOKRASI

Religi & Otoritas

Dr. MUHADAM LABOLO



DEMOKRASI

EKSEKUTIF

LEGISLATIF

YUDIKATIF

PERS

f

t

B

g+

o

Editor : Muhammad Riqqo Khadafi



DEMOKRASI **Religi & Otoritas**

Demokrasi bukan sistem nilai murahan. Dia membutuhkan kesadaran kolektif pada variabel tertentu. Sekurang-kurangnya kecerdasan sosial dan kemakmuran yang adil. Tanpa itu demokrasi hanya menjejalkan prosedur ketimbang substansinya yang agung, kesejahteraan bersama. Kesejahteraan kini tak melulu dikejar pada soal kesenangan duniawiah. Pada batas tertentu rakyat mulai menuntut ke puncak spiritualitas-religi. Entah karena bosan menunggu hasil demokrasi atau berada dalam transisi anomali menuju revolusi manusia ke puncak tertinggi.

Religi berkembang di tengah negara yang memfasilitasi bertumbuhnya nilai universalitas. Dalam keterhimpitan itu tak jarang penganut religi mempertemukan tafsir dengan hukum positif. Negara seakan beradu mulut dengan religi. Padahal negara dibangun di atas spirit religi. Sementara religi menemukan ekspresi justru ketika negara merelaksasi diri dari otoriter ke demokrasi. Ketegangan ini seringkali melahirkan otoritas di luar nalar hidup berbangsa dan bernegara.

Otoritas hendaknya disadari dan digunakan sepatunya. Kemiskinan otoritas membiarkan anarchisme tumbuh dimana-mana. Melembihkan otoritas mencipta kesombongan akibat abuse of power. Hasilnya kerusakan fungsional maupun struktural akibat kegagalan memahami otoritas dan cara menggunakannya.

**BUTIR PEMIKIRAN
DEMOKRASI, RELIGI & OTORITAS**

Muhadam Labolo



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**BUTIR PEMIKIRAN
DEMOKRASI, RELIGI & OTORITAS**

Penulis : **Muhadam Labolo**

Editor : Muhammad Riqqo Khadafi

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Tukaryanto, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5251-04-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-
5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik
perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku ini kumpulan tulisan yang berserakan di media sosial. Oleh Muhammad Riqo Khadafi di koleksi dan ditata menjadi buku dengan judul *Butir Pemikiran Demokrasi, Religi & Otoritas*. Judul itu setidaknya mewakili banyak topik yang sulit diambil karena memiliki kekuatan dan kelemahan pada ruang dan waktu berbeda. Semua itu merefleksikan lanskap pemerintahan yang luas dan saling terkait dari satu isu ke isu lain. Saya berterima kasih atas semua usaha Riqo, demikian pula penerbit yang berkenan memproduksi buku ini hingga ke tangan pembaca. Dalam konteks kekinian buku ini dapat dibaca melalui digital.

Terkait pemaknaan, sepenuhnya penulis serahkan pada pembaca untuk menangkap pesan di setiap isu yang berlainan. Sebagai butiran pemikiran yang terpecah tentu membutuhkan pengembangan. Dari penulis mungkin sekedar merespon, menyediakan seperangkat gagasan pendek, kritik sosial sebagaimana yang lain, atau transformasi pengetahuan yang terbelenggu di menara gading.

Dengan maksud itu, kita berharap tulisan sederhana ini dapat dimanfaatkan kearah projek perubahan yang telah dimulai oleh berbagai komponen anak bangsa bagi tercapainya pemerintahan yang baik. Kebaikan itu tak hanya diproyeksikan pada pemerintah sebagai sentral gravitasi, juga masyarakat sebagai pemetik manfaat sekaligus produsen pemerintahan itu sendiri. Trima Kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PERCIKAN DEMOKRASI	1
1. Merawat Kepercayaan	2
2. Menguatkan Subkultur Sosial	7
3. Mengendalikan Polarisasi Politik	14
4. Menata Ormas	18
5. Menyaring Toksin di Ruang Publik.....	25
6. Relasi DPRD dan Pemerintah Daerah	28
7. Penguatan Sistem Pemilu	33
8. Distorsi Representasi.....	39
9. Merawat Demokrasi.....	42
10. Reformasi Politik	48
11. Masa Depan Pemilukada.....	52
12. Bom Pandemi di Pilkada	56
13. Membatasi Cukong-Demokrasi	58
14. Membaca Pesan Politisi	62
15. Demokrasi Substansial, Catatan Akhir Tahun.....	67
SPIRIT RELIGI	70
16. Meredakan Ketegangan Agama dan Negara.....	71
17. Simbiotik Agama-Negara	78
18. Mitos, Religi dan Sains.....	81
19. Toleransi dalam Relasi Bernegara.....	84
20. Urgensi Etika Jabatan.....	87
21. Mengetuk Nurani Hakim	90
22. Membumikan Pesan Presiden.....	93
23. Kebodohan dan Kebahagiaan	96
24. Merawat Budaya	101
25. Limpahan Potensi Janda	107
26. Kebenaran dan Keberanian Sufi.....	115
27. Peran Agama Melawan Korupsi.....	118
28. Mengubah Wajah Kebudayaan.....	122
29. Menjaga Skeptisisme.....	125
30. Moralitas Negara.....	129

OTORITAS DI RUANG PUBLIK.....	132
31. Mengurangi Kesenjangan.....	133
32. Menimbang Desain Kebijakan.....	138
33. Catatan Kritis Kebijakan Pemerintahan Daerah.....	143
34. Mengembalikan Marwah Kemendagri.....	148
35. Relasi Alit dan Elit	152
36. Reorientasi Subkultur Ekonomi.....	154
37. Pamong dan Resiko Pelayanan.....	157
38. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Sebuah Perbandingan ...	161
39. Produk Leadership	164
40. Mendorong Potensi Logistik.....	168
41. Politik Otonomi Pasca Omnibus Law	173
42. Kepalsuan dan Mal-administrasi.....	176
43. Dialektika Ilmuan di Media Sosial	180
44. Corona dalam Persepsi Awam	183
45. Membaca Kontradiksi Pemerintahan.....	185
46. Rekonstruksi Sejarah Pemerintahan.....	188
47. Implikasi Teknologi Informasi.....	191
48. Tantangan Revolusi Industri.....	197
49. Restrukturisasi dan Refungsionalisasi	200
50. Menguji Eksistensi BPIP.....	206
51. Tantangan Paradigma New Normal	211
52. Keistimewaan Pamongpraja	214
53. Evolusi Manusia Pasca Pandemi	216
54. Ibukota Negara, Administratif atau Otorita?	219
55. Konsekuensi Otorita di Ibukota Nusantara.....	222
56. Status Jakarta Pasca Relokasi	225
TENTANG PENULIS	228



DEMOKRASI, RELIGI & OTORITAS

Muhadam Labolo





PERCIKAN DEMOKRASI



1

Merawat Kepercayaan

Popularitas banyak pemimpin di dunia kini mulai memudar. Di level antar negara kita menemukan para pemimpin di Jepang, Korea, Perancis, Amerika bahkan Indonesia mengalami penyusutan dari kesan positif ke gambaran sebaliknya, dikiritik, dicaci, difitnah, diadu-domba, dilecehkan bahkan dibuihkan. Parahnya, fenomena semacam itu di negeri kita kini melanda hingga ke hirarkhi pemerintahan terbawah sekelas pemerintah daerah bahkan desa. Sebabnya tentu banyak hal, namun intinya mereka gagal merawat kepercayaan rakyatnya. Kegagalan merawat kepercayaan adalah gejala umum dalam rutinitas kepemimpinan politik dan pemerintahan dimana saja. Pokok masalahnya bukan disitu, perlu ditemukan di tengah kedalaman laut yang bahkan mendekati tubir. Pertanyaannya adalah apakah penyebab lahirnya ketidakpercayaan rakyat selama ini? Dari sisi metodologi, kepada siapakah mesti diperoleh jawaban atas permasalahan yang dihadapi rakyat? Dan di tingkat pragmatisnya, bagaimanakah memperbaiki kepercayaan rakyat di tengah dinamika dan tekanan yang terus-menerus mendera para pemimpin pemerintahan?

Menurut Latif (2015), kebanyakan ketidakpercayaan rakyat kepada pemimpin disebabkan oleh menumpuknya kebohongan. Dalam kritik lebih jauh atas kebohongan itu,

2

Menguatkan Subkultur Sosial

Makalah pendek Dr. Riant Nugroho (Senin, 13 Feb 2017) yang menjadi autokritik ilmu administrasi negara dalam *scientific traffic* berjudul krisis ilmu administrasi negara tampaknya memiliki alasan yang sama ketika ilmu pemerintahan mengalami kebangkitan pasca runtuhnya orde baru (1998). Perjalanan teoritik pemerintahan sebagai ilmu (*science*) memperoleh setidaknya dua alasan kuat pada waktu itu, yaitu ilmu pemerintahan klasik yang bergerak dari Belanda hingga mendarat di ruang akademik Indonesia bukanlah ilmu yang semata bernuansa politik, administrasi maupun hukum (Ndraha, 2001). Kesimpulan itu setidaknya dapat dilihat pada catatan Van Poeltje (1955) yang mendeskripsikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari upaya untuk mencapai kebahagiaan seluas-luasnya, baik jasmani maupun rohani tanpa merugikan orang banyak. Memang bila ditelaah lebih jauh batasan ini dapat saja membuka perdebatan Panjang. Misalnya dalam perspektif politik dapat dianggap bagian dari pemahaman filsafat politik (upaya mencapai kebahagiaan bersama dan seluas-luasnya, lihat Aristoteles tentang *commons good*).

Tentang batasan tanpa merugikan orang banyak dapat dilihat dari kacamata politik sebagaimana defenisi yang jamak dikemukakan David Easton soal penggunaan kekuasaan yang

3

Mengendalikan Polarisasi Politik

Dampak polarisasi politik pasca pesta demokrasi di hampir semua level melahirkan kekuatiran. Pilpres tak hanya mencipta pasangan presiden, juga melahirkan kaum *cebongers* dan *kampreters*. Dua kelompok warganet itu hanya sepi saat terminologi kadrin (kadal gurun) muncul mendominasi ruang media sosial kekinian. Catatan Fahmi Ismail pada instagram (13 Agustus 2020) menunjukkan secara statistik sepanjang 2019 penyebutan cebong mencapai 2,58 juta mention, kampret sebanyak 2,43 juta, dan kadrin sebesar 1,88 juta. Pada Juli-Agustus 2020, stigma kadrin mencapai 155 mention melampaui cebong sebanyak 49k dan kampret 71 ribu.

Polarisasi politik pasca pilkada juga memproduksi pembelahan. Memang pembelahan itu tak sekental Pilpres, namun di daerah yang paling menikmati adalah birokrat. Akhir pesta demokrasi suka tak suka melahirkan kelompok tim sukses versus bukan tim sukses. Kelompok abstain masuk kategori non tim sukses. Efek pembelahan itu mencipta politik balas budi dan balas dendam. Polarisasi di level pilkades juga tak sepi dari pembelahan. Setidaknya terbentuk kelompok dinasti versus non dinasti. Semakin ke desa semakin homogen sehingga relasi antara calon pemimpin dengan basis pemilih semakin terikat secara

4

Menata Ormas

Pasca ketegangan pemerintah dengan salah satu Ormas yang dinilai berpandangan non Pancasila, kini muncul kesadaran tentang bagaimana menata kembali aktivitas bertumbuh dan berkembangnya organisasi masyarakat (ormas). Ormas secara sosiologis adalah bibit bagi persemaian ikatan sosial dari sekedar urusan rumah tangga sebagai mikroskopis negara. Disadari betul bahwa pergerakan ormas secara historis seperti Boedi Oetomo yang awalnya bercorak etnik (1908) hingga terbentuknya organisasi beraksentuasi politik seperti PNI (1927) membawa perubahan mendasar hingga membuahkan Indonesia sebagai negara yang kompleks. Diluar alasan filosofistik yang menjadi dasar bagi keinginan alamiah setiap individu untuk mengekspresikan perasaan komunalnya melalui organisasi sosial, secara politik ormas dalam bentuk apapun tak lain adalah sarana bagi pencapaian kepentingan individu maupun sosial lewat ruang publik.

Sekalipun demikian, ruang publik bukanlah wadah yang berkembang tanpa batas. Sebagaimana luas otonomi individu (privasi), daerah (*autonomy*) maupun negara (*dignity*), ruang publik tetap saja dibatasi oleh sistem yang lebih luas dan berlapis-lapis. Negaralah yang membatasinya lewat instrumen hukumnya, tapi bukan pula menafsir semauanya. Keseluruhan

Menyaring Toksin di Ruang Publik

Survei *Digital Civility Index* (DCI,2020) menunjukkan bahwa tingkat kesopanan warganet di Indonesia paling buruk di Asia Tenggara. Penyebabnya tiga hal, hoax dan penipuan yang mencapai 47%, ujaran kebencian di angka 27%, dan diskriminasi sebesar 13%. Mirisnya, 68% pegiat digital di ruang publik didominasi oleh kelompok dewasa. Kontribusi mereka mempengaruhi komunikasi kolektif yang saling menegasikan.

Ruang publik digital dipenuhi toksin. Ekses teknologi menciptakan luapan informasi. Meluber kemana-mana, seperti lahar panas yang menghantam kesantunan sosial. *Public sphere* digital tak menyediakan waktu bagi *warganet* untuk berpikir. Setiap cuitan pendek melahirkan respon hingga *emotion* kontra produktif. Saling menyambar bahkan menguliti perasaan. Sebagian tampil ekspresif, unjuk diri, kendati dangkal makna. Sisanya diam dan menarik diri. Ruang publik berubah menjadi ancaman serius bagi kredibilitas seorang pakar sekaliber apapun. Mereka bisa dihina, dinistakan bahkan diisolir.

Kita hidup dalam ruang publik digital tanpa batas. Setiap *warganet* bersembunyi di balik topeng akun masing-masing. Raganya raib, namun perasaan dan pikiran muncul laksana iklan pendek yang menipu. Ruang publik digital seakan melenyapkan

6

Relasi DPRD dan Pemerintah Daerah

Pasca revisi UU 32/2004 menjadi UU 23/014 Tentang Pemerintahan Daerah, eksistensi DPRD menjadi lebih terang benderang sekalipun pada sisi lain tetap mengandung misteri. Kejelasan eksistensi DPRD tersebut setidaknya terlihat dalam pasal 2 UU No. 23/2014 dimana kedudukan DPRD adalah pejabat daerah. Selama ini satu-satunya entitas yang tidak jelas jenis kelaminnya adalah DPRD, apakah pejabat negara atau pejabat daerah. Konsekuensi sebagai pejabat daerah inilah yang menjadi dasar mengapa diperlukan revisi terhadap PP 24/2007 dan turunan revisinya (37 dan 21/2008) Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan. Sayangnya hingga memasuki awal tahun 2017 sejak janji Presiden SBY dan Jokowi, peraturan tersebut tak kunjung selesai disesuaikan. Lamanya penyesuaian tersebut mengakibatkan DPRD sulit untuk diperlakukan sebagai pejabat daerah dibanding Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selama ini statusnya jelas sebagai Pejabat Negara.

Persoalan yang selalu muncul adalah apakah perlakuan terhadap DPRD setaraf dengan pejabat eselon tertentu di level pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ataukah perlakuan terhadap DPRD hanya pada soal keprotokoleran dan keuangan semata. Pada soal protokoler misalnya, apakah perlakuan

7

Penguatan Sistem Pemilu

Dalam sistem politik demokrasi, pemilu adalah mekanisme bagi sirkulasi kekuasaan secara periodik. Di Indonesia, setiap lima tahun sirkulasi kekuasaan dilakukan untuk melahirkan kepemimpinan politik baik Presiden/Wakil Presiden, anggota legislatif (DPR, DPRD), serta kepala daerah/wakil kepala daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Wakil dan Walikota/Wakil). Pasca kemerdekaan RI (1945), mekanisme pemilu dilaksanakan secara tidak langsung. Perubahan mekanisme dalam sistem pemilu terjadi pasca amandemen konstitusi keempat dimana presiden/wakil presiden dipilih secara langsung, sedangkan pemilu legislatif dilakukan melalui mekanisme distrik (proporsional terbuka).

Disisi lain mekanisme pemilu bagi kepala daerah dan wakil dilakukan pula secara langsung dan serentak (2005 & 2015-sekarang). Problematika pemilu yang sering dihadapi setidaknya dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu masalah substansial dan masalah prosedural. Masalah substansial berkaitan dengan pertanyaan apakah perubahan mekanisme dalam sistem pemilu telah melahirkan kepemimpinan yang tidak saja akseptabel juga berkualitas? Realitas menunjukkan bahwa mekanisme pemilu khususnya pemilu legislatif dan kepala daerah baru menghasilkan wakil rakyat dan kepala daerah dengan jumlah

8

Distorsi Representasi

Untuk kesekian kalinya demokrasi kita di uji. Di uji seberapa kuat Ia berhadapan dengan sumber kedaulatannya sendiri, rakyat. Rakyat menguji gagasan idealnya lewat kontrol di dalam maupun di luar parlemen. Bila kanalisasinya normal, anggota parlemen dapat berdebat hebat hingga berhari-hari, bukan sembunyi dan berpindah-pindah. Sebaliknya, bila saluran ekspresinya abnormal, parlemen jalanan menjadi pilihan dialektika. Ide demokrasi secara historik digagas oleh rakyat sebagai kritik atas kegagalan autokrasi (Lincoln, 1861). Dapat dipahami mengapa demokrasi selalu bersentuhan dengan pesta rakyat dan tumpahan demonstran dijalanan. Bila sukseki rakyat berpesta, bila marah rakyat memperlihatkan perilaku sebaliknya, mencari wakilnya, menawar kembali akuntabilitas dengan paksa.

Tak beda dari sistem lain, demokrasi pun bukan yang terbaik, Ia memiliki talenta bawaan sekaligus virus yang mematikan bila alpa dikelola dengan bijak. Bakat bawaan itu setidaknya menawarkan pilihan bagi kaum rasional untuk mengekspresikan kehendaknya dalam arena yang dibingkai tanggungjawab dan pondasi hukum. Dengan begitu semua kemelut yang terjadi dapat dikanalisis lewat institusi yang tersedia. Sisi buruknya bila demokrasi tak diberi prasyarat, di tingkat teknis Ia hanya mengantarkan sekumpulan aktor ke

9

Merawat Demokrasi

Imaji kelompok tertentu merekonstruksi kembalinya mumi negara khilafah sama dan sebangun dengan apa yang diimpikan kaum sosialis, ultra-nasionalis dan kelompok religi tertentu demi tegaknya tatanan baru yang lebih ideal. Sejenak tak ada yang keliru di tengah konsensus mayoritas kita menerima dengan lapang dada apa yang menjadi realitas hari ini, yaitu negara bangsa (*nation-state*). Negara bangsa adalah hasil konsensus *founding fathers* yang berdiri di atas tonggak idiologi Pancasila dan UUD 45. Tentu saja negara bangsa tak muncul begitu saja. Dia tumbuh lewat pesona dialektika yang tak hanya bersinerji, juga berbenturan untuk sampai ke titik-temu Indonesia hari ini.

Kaum sosialis dimasa lalu membayangkan perlunya suatu negara yang adil, sama rata sama rasa. Faktanya perbedaan itu *sunnatullah*. Setiap materi tak selalu dapat dibagi absolut, juga proporsional. Produknya keadilan proporsi, bukan semata keadilan absolut. Sosialisme berlebihan tak jarang bertransformasi ekstrem sebagaimana praktek komunisme diberbagai wilayah termasuk Indonesia. Mereka yang tak sejalan bisa dianggap kontra-revolusi dan berakhir pedih di Sumur Buaya. Lihat juga Vietnam dan China yang jauh hari mengubur masa depan demokrasi.

Reformasi Politik

Jika diteliti seksama, inti pengaturan rezim pemerintahan daerah adalah pembagian kekuasaan (*sharing of power*). Pembagian kekuasaan dimaksud adalah bagian dari sharing kekuasaan eksekutif secara vertikal. Sementara pembagian kekuasaan horisontal terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif (Locke, Montesquieu, Kant). Dalam bahasa undang-undang, kekuasaan diterjemahkan dengan istilah kewenangan (*authority*). Kewenangan bagian dari kekuasaan yang bersifat formal (Alfian,1999). Kewenangan melekat pada institusi, sedangkan wewenang lazim pada person. Di tingkat teknis istilah kewenangan diubah menjadi urusan. Urusan pemerintahan.

Urusan dalam undang-undang pemerintahan daerah dibagi menjadi urusan pemerintah pusat dan daerah. Klasifikasinya menjadi urusan absolut, bersama (*concurrent*) dan pilihan. Urusan bersama menjadi urusan wajib dasar dan non dasar. Jadi sekali lagi, esensi penting rezim pemerintahan daerah itu berkaitan dengan soal pembagian kekuasaan, sisanya pelengkap penderita. Pelengkap bermakna bahwa pasal lain dalam batang tubuh menyempurnakan implikasi dari pembagian kewenangan antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

Kalau kita bicara pembagian kekuasaan artinya kita bicara dalam lanskap politik. Karena politik dalam makna

Masa Depan Pemilukada

Sesuai jadwal, Pemilukada serentak rencananya akan digelar tanggal 9 Desember, setelah sebelumnya tanggal 23 September 2020. Kompromi ini mungkin bukan last decision, bergantung back up anggaran, statistik Covid 19, prediksi partisipasi publik, mekanisme Pemilukada dimasa Corona, serta dinamika diruang publik yang direpresentasikan oleh wakilnya di Senayan. Soal dukungan logistik pemilukada, kita paham bahwa hampir semua pos anggaran di pusat dan daerah telah mengalami optimalisasi berkali-kali dengan urgensi refocusing anggaran terkait Covid 19. Lebih 405 triliun didistribusikan pada upaya perlindungan kesehatan, stabilisasi lapangan kerja, serta jaring pengaman sosial. Itu artinya pemerintah serius memprioritaskan keselamatan publik dibanding program lain.

Persoalannya, apakah mekanisme demokrasi yang diwujudkan melalui pemilukada sama pentingnya dengan keselamatan publik? Menurut saya tergantung kapan mekanisme demokrasi itu ditentukan dan kapan dikecualikan, namun untuk alasan keselamatan publik, semua reasoning apapun menjadi tak begitu penting dengan prinsip solus populi suprema lex. Maknanya bila kondisi negara dalam keadaan relatif normal tanpa ancaman bahaya alam maupun non alam, pilihan mekanisme demokrasi menjadi perkara penting. Dalam memilih

Bom Pandemi di Pilkada

Pandemi kali ini tak kunjung melandai. Alih-alih mendarat, angkanya meroket menimbulkan kepanikan dimana-mana, tak terkecuali mereka yang mengambil bagian dalam pesta demokrasi, pemilukada. Kecemasan terburuk kita adalah ketika pesta berubah menjadi puncak bencana. Bukan mustahil, semua area pencoplosan diperkirakan dapat menjadi klaster terbaru hingga mencapai titik ledak bom atom sebagaimana prediksi Qodari (2020). Bila itu bukan spekulasi *positivity rate*, alamat salah pasti ditujukan ke pelaksana pesta demokrasi sebagai upaya sistemik, terstruktur, masif, dan terencana. Demokrasi hanyalah sebuah pilihan sistem.

Mekanismenya tersedia sesuai kebutuhan, tinggal ditarik dirak buku, manakah yang lebih efisien dan efektif diterapkan dimasa sulit semacam ini. Apalagi kita kaya akan pengalaman soal praktek demokrasi melebihi negara-negara di Asia Tenggara. Memaksakan pesta ditengah ancaman pandemi sama saja bunuh diri massal. Pesta biasa dengan skala kecil dikampung kita bubarkan, apalagi pesta besar yang melibatkan ribuan bahkan jutaan orang. Itu konyol, pelaksana bisa dituduh pembunuhan berencana.

Pilihan terbaik menunda kata Jusuf Kalla (2020), apalagi secara normatif perubahan ketiga Perpu 2/2020 pasal 201a

Membatasi Cukong-Demokrasi

Survei INES tentang pertimbangan masyarakat memilih menunjukkan 50,3% karena uang, 22,4% iklan, 17,2% program, sisanya 10,1% karena visi (Rep, 20 Nov 2012). Data itu setidaknya mengkonfirmasi bahwa daya tarik paling *sexy* dalam pilkada tak jauh dari aktivitas saweran. Itu potret dilapis terbawah, belum lagi pesta dilevel atas. Semua pesta lokal itu membutuhkan biaya. Biaya tak mungkin ditanggung paslon, dia membutuhkan pihak lain, cukong kata Mahfudh MD (Sept, 2020). Pada 1950an istilah cukong, dalam bahasa Hokkian merujuk ke pengusaha, majikan, atau bos tertinggi. Di era 1960an istilah cukong diproduksi orde baru bersifat negatif serta menunjuk pada etnik tertentu yang kerap melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perbisnisan (wikipedia,2020).

Ketika mekanisme pilkada dilepas ke pasar bebas, yang tumbuh adalah pemegang modal, kaum kapitalis. Dulu para pemodal menyemut di pusat. Pasca desentralisasi mereka berbondong-bondong mengangkat koper ke daerah, berjudi lewat pilkada. Praktis para spekulan dan rentenir kelas kakap pun hanya migrasi dari sentrum kekuasaan ke local-government (Olson, 2005). Apalagi peran pemerintah sebagai invisible hand dibatasi sejauh mungkin, dinamika

Membaca Pesan Politisi

Usulan politisi Wahyu Sanjaya terhadap status IPDN agar diswastakan dapat dimaknai dalam ragam perspektif. Bila itu sekedar usul, tentu masih ada usulan yang lebih ekstrem, lihat usulan beberapa anggota dewan dan publik pasca kasus Wahyu Hidayat & Clift Muntu 2004/2007, IPDN dibubarkan. Kita telah melalui turbulensi itu. Andai kritik, patut dicermati nuansanya dengan hinaan. Beda tebalnya pada faedah. Kritik memberi tanggapan sekaligus mengurai masalah. Kepada kita diberi insight positif. Itulah mengapa kita butuh kritikus film, musik hingga karya ilmiah. Sentimen positifnya kita revisi atau rekonstruksi.

Menariknya, kritik tak hanya membangun kesempurnaan dan intropeksi subjektif, juga menunjukkan bahwa seseorang telah menikmati karya kita sedemikian masif sehingga tak perlu dianggap pelecehan. Jangan-jangan sejak beliau lahir, masuk sekolah, hingga seleksi dan lolos di Senayan tak lepas dari pelayanan prima seorang Pamongpraja di desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Sama halnya Alex Litaay, Ahok dan mantan penasehat UKP4 era SBY, Kuntoro Mangkusubroto pun pernah menyampaikan kritik yang lebih keras. Bagaimanapun realitas kebenaran kata para ahli hikmah

15

Demokrasi Substansial, Catatan Akhir Tahun

Di tengah keberhasilan kita melalui ancaman pandemi tahun kedua, catatan demokrasi kita perlu menjadi perhatian utama menyambut tahun depan yang penuh dinamika ketidakpastian. Dengan mensinergikan kekuatan dan peluang guna meminimalisir kelemahan dan ancaman, kita dapat mengungkit pesimisme ke optimisme guna menggapai visi terbaik di tahun-tahun mendatang. Agenda politik utama memasuki pesta besar 2024 adalah mempersiapkan landasan prosedur demokrasi sebaik mungkin. Sekalipun pengalaman tahun-tahun sebelumnya memperlihatkan partisipatory engagement relatif tinggi, namun demokrasi kita di setiap periode terjebak oleh upaya merevisi prosedur ketimbang meraih substansinya.

Demokrasi prosedur itu kita akui telah banyak mengkanalisasi berbagai soal, namun jaminan terhadap ekspresi hak-hak sipil dalam catatan Freedom House (2019), IDEA (2020), IEU (2020) & BPS (2018) belum bersahabat dengan aksi mural dan kebebasan berucap di ruang publik. Tanpa mengecilkan upaya mereparasi prosedur itu, agenda demokrasi kita sepatutnya dirancang seserius mungkin



SPIRIT RELIGI



Meredakan Ketegangan Agama dan Negara

Ketegangan agama dan negara tak pernah surut. Dalam waktu tertentu memasuki tensi mencemaskan. Agama dan negara pada dasarnya konsep yang juga abstrak. Keduanya hanya dapat ditemukan dalam ciri masing-masing. Agama tampak dalam ritus, lembaga, otoritas, organisasi, bahkan dogma. Sementara negara tampak dari unsur-unsur pembentuknya seperti pemerintah, rakyat, teritorial dan kedaulatan. Di level praktis agama mewakili penganut suatu keyakinan homogen, sedangkan negara biasanya mewakili konsensus semua ikatan dalam masyarakat.

Ketegangan sesungguhnya bukan antara agama dan negara, tapi antara penganut keyakinan dan pemerintah sebagai representasi negara. Penganut pun tak seluruhnya, demikian pula pemerintah. Tidak semua penganut agama berbeda pendapat dengan pemerintah. Di sejumlah negara yang memformalisasikan agama kedalam negara bukan pula tanpa masalah. Apalagi yang jelas-jelas menganut sekularisme. Minoritas penganut agama adalah mereka yang secara langsung berupaya mendasarkan perilaku bernegara di atas hukum agama. Kehendak itu tak hanya nilai, juga asesoris yang bahkan merupakan kebudayaan lampau bangsa lain di tengah fakta negara dibangun berdasarkan konsensus sejarah yang bersifat majemuk.

Simbiotik Agama-Negara

Sejak dulu bahkan sampai nanti, ketegangan agama versus negara selalu dipenuhi kontraksi. Pada titik tertentu keduanya berusaha menampilkan ego otoritasnya masing-masing. Di tingkat ideal keduanya hidup dalam rukun bernegara, entah negara sebagai *lead*, atau agama sebagai pandu. Dalam ajaran sekularisme, agama hidup sekalipun menjaga jarak dengan negara. Agama adalah privasi yang dibiarkan merdeka begitu saja (Kencana, 2018). Dalam paradigma simbiotik, agama ibarat matahari yang menerangi negara sebagai bulan bagi cahaya di bumi. Berbeda dengan itu, negara yang meletakkan agama sebagai satu-satunya sumber nilai mengharuskan pemerintah tunduk pada otoritas agama. Negara dalam paham semacam itu hanyalah bagian dari lanskap agama yang maha luas.

Dalam konteks negara agama, otoritas negara relatif tak banyak dipersoalkan. Alasannya pemerintah sebagai personifikasi negara adalah representasi konkrit firman Tuhan dan sabda dari siapa saja yang memiliki predikat pesuruh-Nya. Dengan doktrin ini setiap pembangkangan dapat dimaknai pengingkaran terhadap otoritas Tuhan dan pesuruhNya melalui mana pemerintahan dijalankan. Ketegangan mudah ditemukan pada negara yang memisahkan urusan agama dan negara. Di

Mitos, Religi dan Sains

Dunia bergerak dalam kebimbangan orientasinya. Antara melaju pada kecepatan sains atau kembali keruang transedental yang penuh misteri, mitos dan religi. Sejak lama mitos menstimulasi semangat bangsa tertentu untuk maju. Jepang yakin mereka adalah generasi penerus Dewa Matahari yang menyinari alam. Bangsa Jerman percaya bahwa merekalah Ras Aria paling sempurna di muka bumi. Sisi baiknya keyakinan kolektif itu memberi energi bagi pertumbuhan logos hingga kemajuan bangsanya diberbagai bidang. Eksesnya, kepercayaan diri yang berlebihan itu menciptakan ambisi menaklukkan, eksploitatif dan kolonialisasi seperti slogan simpatik saudara tua dari timur, atau tragedi genosaid bagi bangsa Yahudi.

Religi datang menjadi pelita bagi gelapnya mitos dan pengetahuan. Ada kekuasaan tunggal dan maha luas yang mengendalikan segalanya. Religi berusaha menjernihkan keyakinan kelam pada jalan spiritual yang menjanjikan, surga dan neraka. Maknanya semua perbuatan ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Semua yang tersentuh indrawi maupun yang belum menjadi tanggungjawab Tuhan hingga lingkup mikroskopis. Sedemikian banyaknya tanggungjawab Tuhan hingga kredibilitasnya tak jarang terancam didistorsi, dimanipulasi, diperkosa, bahkan dibajak oleh otoritas religi

Toleransi dalam Relasi Bernegara

Rilis survei tingkat toleransi dikalangan mahasiswa oleh PPIM UIN Jakarta menunjukkan 30,16% mahasiswa memiliki sikap toleransi beragama rendah (27 Des 2020). Angka itu akumulasi dari 24,89% rendah dan 5,27% sangat rendah. Menariknya, angka toleransi mahasiswa di sekolah kedinasan lebih tinggi dibanding perguruan tinggi negeri dan swasta. Meski begitu, secara umum tingkat toleransi dikalangan mahasiswa masih lebih tinggi. Sikap minoritas itu bermakna bahwa penghargaan & penghormatan terhadap perbedaan keyakinan belum selaras dengan esensi yang diajarkan oleh religi. Indikasi itu seakan mengkonfirmasi cara beragama kita, khususnya relasi horisontal yang kerap menimbulkan kecurigaan antar dan internal beragama. Intoleransi dalam relasi beragama.

Toleransi dalam sedikit literasi dipahami sebagai kesadaran akan keberagaman disekeliling kita. Dalam arti luas, toleransi tak hanya dialamatkan pada kesadaran berupa penghormatan dan penghargaan terhadap pola relasi beragama antara penganut keyakinan berbeda, pun terjadap kemajemukan apa saja sebagai kekayaan Tuhan. Menolak keragaman sama halnya menolak sunnatullah. Kita tak pernah memilih menjadi apa saat sebelum dilahirkan. Dengan kehendakNya, kita menerima perbedaan itu, entah suku, ras bahkan agama. Pendek

20

Urgensi Etika Jabatan

Dialektika ruang publik akhirnya redam pasca kemunduran tokoh sentral dalam soal rangkap jabatan. Perilaku itu tentu bukan baru sekali, bahkan bukan hanya disitu. Diberbagai tempat pun jamak terjadi, walau baru *ambyar* jika diperkarakan di tengah ironi publik menahan sakit & meregang lapar akibat pandemi. Dalam optik etika, sejauh rangkap jabatan menciptakan kenyamanan bagi subjeknya, tentu bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. Pandangan *hedonistik* itu tentu berlawanan dengan kaca mata kaum *utilitaristik*, bahwa kesenangan individu tidaklah etis jika tidak bersentuhan dengan kebahagiaan kolektif. Apalagi jabatan yang diemban berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yaitu generasi didikan dan simpanan rakyat di bank perdesaan.

Pada setiap kita, diberi Tuhan akal budi yang tumbuh dan berkembang sejak kanak. Apalagi jika di tempa dan di *guide* lewat institusi domestik (keluarga). Sadar atau tidak kemampuan kita menceraikan sesuatu yang baik & buruk terbentuk dengan sendirinya. Inilah etika yang dikatakan Immanuel Kant dan Al Ghazali sebagai nalar praktis yang bersifat fitri, dan karenanya menjadi kewajiban. Bedanya, Kant berpijak menurut perspektif antroposentrik (akal pikir), sementara Ghazali berangkat dari teosentrik (wahyu-doktrin Islam).

Mengetuk Nurani Hakim

Beberapa hari lalu seorang istri dituntut bersalah 1 tahun penjara oleh hakim di Pengadilan Karawang karena menegur suami yang suka mabuk. Oktober lalu, di Medan, seorang wanita korban penganiayaan preman dijadikan tersangka oleh Polisi. Dua kasus di atas sedikit contoh bagaimana hukum bekerja di sekitar kita. Sebagai pembanding, seorang hakim di Amerika baru-baru ini membebaskan seorang anak yang diajukan ke meja hijau oleh toko kecil tempat ia mencuri sepotong roti dan keju. Hakim tak hanya mendenda semua yang hadir sebanyak 10 USD, juga dirinya sendiri dan mini market tersebut. Ia menyimpulkan bahwa kejahatan manusiawi itu produk dari ketidakpedulian masyarakat.

Setahun lalu, Helena Johnson dari Tarrant, Alabama tertangkap Polisi mencuri 5 butir telur di sebuah mini market. Alasannya untuk memberi makan anak-anaknya yang lapar. Uniknya, Polisi tersebut bukan menangkapnya, justru memberinya kelonggaran untuk memenuhi kebutuhan di toko tersebut. Katanya, *sometimes we shouldn't apply the law but must apply the humanity!* Kasus di atas terjadi pada dua penegak hukum, hakim dan polisi. Satu bekerja di meja

Membumikan Pesan Presiden

Wisuda dan Pengukuhan IPDN kali ini unik dan bersejarah. Unik karena dilakukan lewat virtual, bersejarah karena berada dimasa pandemi covid 19 tahun 2020. Keunikan dan sejarah itu tentu mudah mendekam dalam benak angkatan 27, bahkan menjadi semacam penanda disela gurauan mereka, angkatan covid 19 atau angkatan corona. Kita hanya mampu membangun semangat mereka bahwa dalam masa yang penuh kesuraman ini biasanya Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik diantara kalian untuk menjadi pemimpin dimasa mendatang. Sebab pemimpin hebat biasanya lahir dari terjangan gelombang pasang, cuaca ekstrem, dan ramai cobaan, bukan tumbuh dalam keadaan biasa-biasa saja.

Setiap pemimpin lazim dikirim Tuhan pada latar alam, sosial, politik dan ekonomi yang terpuruk, lengkap dengan sosok antagonis selaku penguji iman dan pembesar jiwa. Artinya latar sosiologis dan perkara yang sedang dihadapi adalah pengungkit yang sengaja disediakan Tuhan untuk menghidupkan setiap pembaharu pada satu masa. Pada semua contoh itu, kita membutuhkan pengorbanan yang tulus sebagaimana perilaku simbolik Ibrahim dan Ismail yang dapat diarahkan pada pengorbanan masyarakat, bangsa dan negara.

Kebodohan dan Kebahagiaan

Menurut survei organisasi kerja-sama ekonomi dan pembangunan (OECD), Indonesia merupakan negara dengan peringkat paling bawah pada hampir semua jenis kompetensi untuk bekerja dan berkarya sebagai anggota masyarakat. Kecakapan orang Indonesia dalam hal membaca, berhitung, maupun pemecahan masalah berada sangat rendah di hampir semua kategori umur. Lebih dari separuh responden Indonesia mendapatkan skor kurang dari level 1 (kategori pencapaian paling bawah) dalam hal kemampuan literasi. Dengan kata lain, Indonesia adalah negara dengan rasio orang dewasa berkemampuan membaca terburuk dari 34 negara OECD dan mitra OECD yang di survei tahun 2016.

Orang dewasa pada level kurang dari satu menurut definisi OECD hanya mampu membaca teks singkat tentang topik yang sudah akrab untuk menemukan satu bagian-informasispesifik. Untuk menyelesaikan tugas itu hanya membutuhkan pengetahuan kosakata dasar dimana pembaca tidak perlu memahami struktur kalimat atau paragraf. Meskipun Jakarta tak mewakili wajah Indonesia secara keseluruhan, namun ketimpangan Jakarta dan daerah lain sangat tajam dalam berbagai indikator kualitas pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta 78,99, sedangkan rata-rata

Merawat Budaya

Meluasnya berbagai isu budaya lokal di Indonesia kini memasuki tahapan yang cukup merisaukan. Budaya lokal jelas kita butuhkan untuk mengkonstruksi puncak budaya nasional. Tanpa itu kebudayaan nasional tak mungkin gemerlap. Sisi sepatnya ketika isu memperjuangkan identitas lokal muncul secara sempit baik pada sistem kepercayaan, simbol bahasa, sistem ekonomi, sistem sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam sistem kepercayaan misalnya, kini lahir kehendak untuk menerapkan satu idiologi agama tertentu sebagai pondasi tunggal bernegara. Bahasa sebagai simbol komunikasi yang mempersatukan (*ke-ika-an*) dari realitas perbedaan (*ke-bhineka-an*) mengalami disfungsi akibat tercemar oleh ujaran kebencian (*hate speech*).

Sistem ekonomi ingin diubah kedalam sistem ekonomi nihil riba dan mampu menjamin keadilan bagi semua orang. Sistem sosial diarahkan pada penguatan identitas lokal melalui sistem politik seperti putra asli daerah sebagai syarat utama, pemaksaan bendera lokal, penguasaan tanah atas nama hak ulayat, kebijakan diskriminatif berdasarkan kepentingan adat, gagasan afirmasi atas dasar eksklusivisme. Tak ketinggalan semangat membentuk sistem pemerintahan lokal sekalipun bersifat simbolik atas dasar argumentasi sejarah.

Limpahan Potensi Janda

Dalam empat edisi berturut-turut, tanggal 3 sampai 6 Oktober 2016, Koran Republika menurunkan *headline* dengan tema seputar meningkatnya angka perceraian. Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung menyebutkan angka perceraian di setiap daerah meningkat tajam. Hingga tahun 2015, produk gugat-cerai di Cilacap berpotensi melahirkan 5.950 janda dari tahun sebelumnya yang mencapai sebanyak 5.884 kasus perceraian. Rata-rata penggugat-cerai berusia antara 24-35 tahun. Di Cimahi, sebuah daerah dekat Kota Bandung yang maju, sejak 2014 sampai 2015 berpotensi memproduksi kurang lebih 6.000 sampai 7.000 janda baru.

Di Depok, kota dekat pinggiran Jakarta yang relatif makmur sejak 2014 hingga 2015 berpotensi melahirkan 3.400 sampai 3.800 janda pertahun. Di Palembang, pengadilan agama rata-rata mampu mencipta 85 janda baru setiap hari. Data Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu rupanya tak berselisih jauh, angka perceraian yang berpotensi melahirkan janda baru meningkat hingga 5.425 kasus pada tahun 2015. Bandingkan dengan tahun-tahun dewasa ini pasca pandemi covid 19 yang melahirkan angka PHK, pengangguran, dan putus sekolah meningkat.

Kebenaran dan Keberanian Sufi

Bagian penutup buku Studi Hermeneutika, Kajian Pengantar karya Edi Susanto (2016) dinukilkan sebuah kisah pendek tentang seorang Sultan saat meminta nasehat pada Sufi. "*Katakanlah kepadaku tentang suatu kebenaran wahai Sufi*". Jawab Sufi, "*mampukah telinga Sultan mendengarkan kebenaran, sebab suara kebenaran melebihi suara petir disiang hari, selaput telinga Sultan bisa terkoyak*", jawab sang Sufi. "*Apa gunanya sepasang telinga yang tak mampu mendengarkan kebenaran, biarlah selaput telingaku robek, aku tetap ingin mendengarkan suara kebenaran*," jawab Sultan. Beberapa tahun kemudian datanglah sang Sufi ke Istana Sultan.

Begitu mendengar kedatangan sang sufi, Sultanpun bergegas ke gerbang istana untuk menjemputnya. Tak lupa turut bersama Sultan, Putra Mahkota, putra tunggal Sultan. Mereka menyalami sang Sufi, "*selamat datang, silahkan masuk*." "*Tunggu dulu, kata Sufi, biar aku memberkati putramu*." Lalu Ia menepuk-nepuk kepala sang Putra Mahkota sambil berkata, "*kamu akan mati*." Seketika itu juga Sultan seperti tidak mempercayai telinganya sendiri. "*Apa yang kau katakan Sufi? Untuk inikah kau datang? Untuk mengutuk anakku? Untuk menyumpahinya?* Sultan murka, bahkan diantara para menteri ada yang sudah mengeluarkan pedang dari sarungnya.

Peran Agama Melawan Korupsi

Judul di atas bermaksud menarik ajaran dan nilai agama guna melawan praktek korupsi yang kini bersifat endemik. Agama jelas-jelas membawa misi mulia yang bertolak-belakang dengan korupsi. Sedemikian kontras agama dan korupsi hingga menjadi isu yang tak sepi khususnya di negara-negara berkembang. Masalahnya, apakah peran agama dalam arti pengaruhnya terhadap upaya menihilkan gejala korupsi dalam masyarakat kekinian dan kedisinian. Kekinian, sebab peran agama dalam tahun-tahun terakhir lebih terlihat sebagai simbol perlawanan otoritas (baca, kekuasaan) dibanding pemberantasan korupsi. Apakah itu berkelindan dengan korupsi pada rezim yang hendak ditumbangkan sebagaimana di timur tengah pasca *arab spring*, ataukah semata-mata ingin menggugat rezim otoritarianisme.

Kedisinian, bahwa peran religi lebih memperlihatkan militansi dalam perseteruan dengan otoritas pemerintah lewat pembubaran ormas yang berseberangan. Sementara indeks korupsi di Indonesia konsisten tumbuh pada skor 37 dengan posisi 102 dari 180 negara (TII, 2020). Pertanyaan yang sama, apakah perlawanan para pegiat agama terhadap otoritas adalah cerminan gerakan anti korupsi ataukah hanya alasan menuju agenda lain yang lebih besar. Tentu perlu dicermati dengan teliti.

Mengubah Wajah Kebudayaan

Gagasan memajukan kebudayaan kita oleh Dirjen Kebudayaan Dikti (Hilmar, Ph.D) dalam webinar bersama civitas IPDN tanggal 20 November 2021 patut dipertimbangkan dalam agenda strategis. Visi besar itu rasanya *compatible* dengan strategi pendidikan IPDN yang sejauh ini konsisten membangun wajah kebudayaan pemerintah (baca;birokrat) lewat sistem konsentrik jarlatsuh. Kebudayaan, dalam lanskap makro setidaknya meliputi gagasan (*ideologi*), tindakan (*behavior*) dan produk dari tindakan tersebut (*artefak*) (Koentjaraningrat, 1997). Problem pertama berkaitan dengan bagaimana membangun kepercayaan pada ideologi (Pancasila) yang dalam 13 tahun terakhir mengalami degradasi hingga 10% (Yusuf, 2020, UMM). Indikasinya, radikalisasi agama dan munculnya ideologi alternatif.

Ironinya, survei *Alvara Research* menunjukkan bahwa angka ketidakpercayaan ASN terhadap Pancasila mencapai 19,4%, atau sekitar 800.000 dari total jumlah ASN (Infokom, 2019). Kelompok eksklusif itu tersebar di 6 kota besar. Rilis itu diyakini BPIP sebagai tantangan atas hilangnya kurikulum pendidikan kognitif Pancasila diberbagai level pendidikan (Hariyono, 2019).

Di ranah perilaku (*behavior*), tantangan terbesar kita adalah hilangnya identitas sosial yang menjadi karakteristik

Menjaga Skeptisisme

Seluruh realitas pada dasarnya hanyalah kumpulan persepsi manusia semata. Setiap pemikiran yang tak dapat di lacak pada kenyataan empirik mesti di tolak. Demikian kata David Hume suatu saat dengan istilah *bundle of perception* (1711-1776). Gagasan itu menjadi salah satu prinsip penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sikap skeptisisme. Skeptisisme dibangun untuk memperoleh kebenaran yang lebih presisi. Tak hanya itu, keraguan merangsang ilmuan melangkah untuk membuktikan. Dalam rimba pengetahuan, semakin tebal sikap skeptisisme semakin besar peluang mengungkap hakekat kebenaran sekalipun sifatnya relatif. Yang benar datangnya dari Tuhan, yang salah dari manusia, kata kaum bijak religi.

Skeptisisme penting untuk membatasi keyakinan ilmuan menjadi absolut di tengah derasnya perubahan sosial. Tanpa keraguan kita dapat menelan mentah-mentah informasi yang luput di saring. Berbeda dengan absolutisme agama yang cukup dijalani. Kebenaran dalam pengetahuan membutuhkan konfirmasi, bukan terjebak pada permainan diksi di media sosial. Dinamika sosial bergerak bukan di bilik hampa.

Setiap manusia terlahir di tengah dinamika sosial yang muncul jauh sebelum kita eksis. Maknanya semua gagasan dipengaruhi masa lalu yang menciptakan rangkaian bagi jalan ke

Moralitas Negara

Sepanjang sejarah filsafat hukum dan negara, era klasik hingga modern, hampir tak ada filosof yang tak terpengaruh oleh esensi moral para senior pendahulunya seperti Socrates, Plato maupun Aristoteles. Bagi sebagian besar filosof itu, moral adalah nilai utama sekaligus pondasi bernegara dan berpemerintahan. Moralitas negara biasanya di *framing* lewat konstitusi. Sinarnya menerangi jalan bagi personifikasi konkrit negara, pemerintah yang silih berganti. Dalam negara yang permanen dengan aneka representasi tadi, pemerintah bertugas mengalirkan cahaya moral kedalam bentuknya yang paling nyata, rupa-rupa kebijakan.

Kecuali itu, bagi filosof realis Machiavelli yang pernah hidup dan menulis *De Principatibus* di era *renaissance* (1513), pemerintah tak perlu terlalu menghiraukan tata moral dalam masyarakat. Kepedulian terhadap hal itu hanya akan merugikan negara. Moral satu hal, negara hal lain. Semua hal yang berpotensi merugikan praktek bernegara sebaiknya dikesampingkan (*staat raison*). Baginya, mengurus negara adalah tentang bagaimana cara orang seharusnya hidup, dan bagaimana cara orang hidup seharusnya. Keduanya hanya mungkin dengan menyiapkan aturan yang memaksa agar setiap orang sadar bagaimana seharusnya hidup yang baik, dan bagaimana hidup



OTORITAS DI RUANG PUBLIK



Mengurangi Kesenjangan

Sejak kasus Al-Maidah ayat (51) dipencarkan oleh mantan penguasa Ibukota Negara (Jakarta), relasi negara dan rakyat mengalami dinamika yang cenderung membelah jarak dalam tekanan dan tensi psikologis yang cukup mencemaskan. Sekalipun sumbernya di Jakarta, namun luapannya membajiri dunia maya hingga menimbulkan dialektika tak sehat. Ketegangan bahkan meningkat tidak saja di titik gravitasi kekuasaan, juga mencederai kualitas percakapan antar kelompok masyarakat berbasis agama, etnik, ras hingga golongan lewat media sosial.

Entah berapa kubik potret atas realitas sungguhan maupun *hoax* diproduksi dari berbagai sumber, pada akhirnya melahirkan bau kebencian, kekesalan, bahkan bibit kesumat di relung hati pemegang *gadget*. Sekalipun tiap hari pula berseliweran informasi penuh motivasi, tips hidup sehat, hingga *warning* spiritualitas, tetap saja gempuran informasi tuna-adab itu mengecilkan semangat untuk terus hidup bersama. Kita tak bermaksud mengusik lebih jauh kesana, karena tulisan pendek ini hanya mengulik tanggungjawab negara yang direpresentasikan oleh pemerintah terhadap kesenjangan antara pemerintah dan rakyat yang kian melebar.

Menimbang Desain Kebijakan

Dalam proses penyusunan kebijakan, pertimbangan akademiknya selalu saja berhubungan dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga pertimbangan itu menyangkut alasan sebenar-benarnya (hakiki), realitas *sosio-cultural*, serta peraturan perundang-undangan yang sedang berlangsung sebagai acuan tertib sosial dalam suatu masyarakat. Oleh sebab pertimbangan filosofis membutuhkan nalar yang tinggi untuk menemu-kenali motivasi yang sesungguhnya sehingga suatu kebijakan benar-benar dibutuhkan, maka diperlukan sejumlah pemikir idealis untuk mengkonstruksi alasan logis dan rasional agar kebijakan tersebut benar-benar dapat diterima oleh akal sehat.

Semakin masuk di akal semakin jelas bahwa pertimbangan filosofis menemukan eksistensinya sebagai *the mother of science* sehingga benar-benar mampu menemukan nilai kebenaran relatifnya (*philia, philein, cinta kebenaran/kebijaksanaan*). Untuk alasan itu lazim dicari sejumlah orang yang berpikir idealis, habitnya biasanya di perguruan tinggi atau dikampus-kampus ternama. Merekalah dosen yang sehari-hari belajar dan mendiskusikan segala sesuatu

Catatan Kritis Kebijakan Pemerintahan Daerah

Lebih dua tahun melewati masa tenggang waktu berlakunya Undang-Undang 23/2014 Tentang Pemerintahan daerah (Okt, 2016), persoalan visi pemerintahan daerah kian tak jelas arahnya. Alih-alih menyelesaikan masalah yang menjadi salah satu tujuan revisi undang-undang tersebut, pemerintah daerah semakin terkungkung dalam ketidakberdayaan menjalankan otonomi daerah yang menjadi spirit desentralisasi sejak awal. Tiga alasan utama revisi Undang-Undang 32/2004 yang awalnya sarat dengan kandungan dan semangat otonomi daerah sebagai *big-bang* serta rentang panjang dari Undang-Undang 22/1999.

Pertama, banyaknya pasal yang bertentangan dengan amanah konstitusi sehingga diperlukan revisi terbatas agar kebijakan tersebut tetap sinkron. *Kedua*, diperlukan pemisahan pengaturan yang lebih independen atas rezim pemilukada dan desa dari rezim pemerintahan daerah. *Ketiga*, perlunya efisiensi agar pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi untuk kepentingan publik.

Bergerak dari setidaknya tiga tujuan tersebut kita membayangkan bahwa undang-undang pemerintahan daerah akan semakin simpel dalam hal pengaturan tentang inti urusan pemerintahan daerah itu sendiri, yaitu terdistribusinya urusan

Mengembalikan Marwah Kemendagri

Sebuah Webinar dengan headline Merekonstruksi Marwah Kemendagri yang dilaksanakan BPSDM rasanya memberi magnet yang kuat untuk direspon secara akademik. Saya meraba dialektika itu lahir karena urusan dan eksistensi kemendagri dalam 10 tahun terakhir seakan mengalami pergeseran. Visinya terasa melemah, sebagian urusannya berpencaran ke instansi lain, desa misalnya. Eksistensinya yang selama ini didukung oleh UU 39/2008 sebagai salah satu Triumvirat seperti terdistorsi di kelas kesekian bahkan portofolio, termasuk masa depan IPDN.

Menurut saya, ada baiknya kita pahami akar kemunculan Kemendagri sebagai kementerian induk (babon) sekaligus satu diantara Triumvirat yang disebut eksplisit dalam undang-undang tersebut. Secara faktual departemen of home affairs dihampir semua negara tetap eksis. Agar rujukan norma tersebut memiliki basis akademis, ide Thomas Hobes, Jhon Lock, Montesque, Imanuel Kant, Van Vollen Hoven, dan Logemann menjadi spirit dalam artikel pendek ini. Dialektika gagasan mereka pada dasarnya telah mendorong terciptanya negara absolut beserta variannya (termasuk negara kesatuan sentralistik) seperti kemunculannya di Romawi, Perancis, Belanda, bahkan

Relasi Alit dan Elit

Mekanisme pilkada langsung pada dasarnya mempermudah imajinasi alit agar berjarak dekat dengan elit yang paling dipercaya lewat lembaran kertas suara. Faktanya, rekomendasi partai tak selalu bersenyawa dengan asa publik. Apa yang dibutuhkan seringkali tak muncul dalam daftar pilihan ganda, kecuali hasrat elit partai yang mesti ditelan mentah-mentah. Kolaborasi warna tak jarang melunturkan karakter asli. Efek warna pada basis konstituen bisa berubah silau, suram atau buta warna. Peluang bagi timses cukup dengan menebar pewarna buatan, *money politics*. Sisi baiknya keindahan warna adalah rahmat, itu cukup membahagiakan menurut anjuran spiritual.

Kesenjangan semacam itu pada kenyataannya menyadarkan kita mengapa elit tak pernah merasa bagian dari alit yang populasinya maha banyak dan maha penting. Elit dan alit sama-sama ter-alienasi di sudut arena kompetisi, berlawanan *vis a vis*, diametral, berkonflik, bahkan kehilangan kesadaran darimana mereka bermula. Mereka yang terpilih merasa lunas kontraknya. Semua telah atau akan dibayar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, *cash and carry*. Tak sedikit yang perlu dicitil lewat balutan projek di setiap tahun anggaran.

Elit, kebanyakan langgeng dan berdiri kokoh karena kebutuhan materialnya di *supplay* lewat pajak oleh kaum alit. Tak

Reorientasi Subkultur Ekonomi

Kerumitan terbesar bagi semua pengambil kebijakan di dunia hari-hari ini adalah membuka kran ekonomi ataukah menutup celah pandemi. Dilema itu tak hanya menekan psikologi penentu arah kebijakan di pusat, demikian pula di daerah. Pilihan kebijaknya melonggarkan sembari mengencangkan. Dua hal yang tak mudah bagi siapapun yang duduk ditampuk pemerintahan, apalagi gejala ekonomi kita menunjukkan ketidakbugaran pada empat variabel utama, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan pendapatan perkapita.

Angka kemiskinan menanjak 26,42 juta jiwa, pengangguran merangkak lebih dari 60 ribu jiwa, ketimpangan gini rasio memperlihatkan 20% menguasai sumber daya, 80% menikmati kerak, sementara pendapatan perkapita melambat 2,97% pada triwulan pertama (BPS, Maret 2020). Data sederhana ini bukanlah hal yang mengejutkan di tengah kekuatiran ekonomi dunia menuju resesi global (Mulyani, 2020). Uniknya, pengalaman resesi memperlihatkan bahwa semakin ke puncak (negara) semakin menguatirkan dibanding dampak resesi di tingkal lokal. Persis perilaku menggunakan masker, semakin ke udik semakin hilang greget-nya, semakin ke kota semakin ketat dan disiplin. Artinya di level terbawah seakan tak takut terjadi resesi.

Pamong dan Resiko Pelayanan

Sejak dulu tugas-tugas Pamong mengandung *high risk*. Hal ini tergambar pada tiga buku terakhir seputar kenangan Pangrehpraja karya SL Van der Wal (2001), Leontine E Visser & Amapon (2008), atau karya pendek La Ode Budzali tentang Bhakti Pamongpraja di Merauke (2017). Dimasa lalu tantangan terbesar Pamong adalah alam liar, tempat mereka pertama kali bertugas. Realitas itu membutuhkan ketahanan mental dan fisik yang tak terkira. Wal menceritakan bagaimana sulitnya mencapai perkampungan adat di wilayah Sumatera, Sulawesi dan pedalaman Kalimantan (1920-1942). Dengan secarik surat perintah dan pakaian dinas putih cukup membuat penduduk setempat menghormati para ambtenaar.

Modal dasar pengetahuan seorang Pamong adalah bagaimana memahami sosiologi dan hukum adat. Praktisnya, temukan pimpinan tertinggi baik adat maupun agama, lalu selesaikan masalah mereka dengan cara mereka (kearifan lokal). Penyelesaian terbaik dikanalisis di rumah adat dan di terima oleh pihak-pihak bertikai. Meski demikian Pamong dapat melayani setiap persoalan dimana saja dan kapan saja. Ini prinsip dasar hadir dimana saja (*omni presence*). Untuk kasus tertentu yang sulit ditemukan cara penyelesaiannya dapat dimusyawarahkan dengan menerapkan hukum positif.

Metodologi Ilmu Pemerintahan, Sebuah Perbandingan

Berbeda dengan ilmu politik, ontologi ilmu pemerintahan dideskripsikan Taliziduhu Ndraha dalam rangkaian tangga vertikal dari Tuhan hingga berakhir pada manusiis (kybernologi I, 2003). Tuhan yang diyakini sebagai sentral gravitasi mendesain individu dalam konstruksi awal berinisial mahluk yang kemudian menanjak ke konsep manusia, penduduk, masyarakat, bangsa, rakyat hingga yang paling kompleks, negara. Terdapat pula konsep orang dan *civil society* yang tak begitu panjang dielaborasi. Jika dipahami secara mendalam, pada setiap konsep itu mengandung konsekuensi dan implikasi luas terhadap eksistensi pemerintahan dan ilmu apa yang patut dipelajari untuk mengkonstruksi posisi akademiknya.

Sebagai contoh, relasi individu sebagai makhluk dengan Tuhan telah melahirkan tidak saja aspek teologikalnya, juga kesadaran etik dan doktrin yang meluas hingga membentuk sistem pemerintahan teokrasi maupun etika pemerintahan. Demikian pula konsep penduduk yang melahirkan kesadaran lingkungan dan demografi. Konsep masyarakat tidak saja membentuk kesadaran sosial, demikian pula hukum. Puncak kesadaran bermasyarakat itu pada akhirnya membentuk bangsa (*nation*) dan negara sebagai puncak tertinggi atas kesadaran

Produk Leadership

Secara teoritik para pemimpin di produk lewat dua cara, *leaders are born or leaders are made/created*. Dalam pola kepemimpinan traditional pemimpin dilahirkan turun-temurun (genetik). Model monarchi semacam itu telah eksis dan paling tua di muka bumi. Memasuki abad 19, produktivitas pemimpin dengan model tersebut kehilangan legitimasi seiring menguatnya teori sosial dan ekologis dalam sistem politik modern. Sebagai antitesa dari pola traditional itu, produk pemimpin di kreasikan lewat dua kanal, yaitu organisasi birokrasi-pemerintahan dan sosial (Wasistiono, 2017). Kelompok eksekutif itu terdiri dari kaum birokrat sipil maupun militer. Mekanisme rekrutmen lewat seperangkat seleksi (*merit system*). Produknya bisa dilihat pada hampir semua institusi yang melahirkan kepemimpinan pemerintahan (birokrasi sipil & militer) sesuai kebutuhan masing-masing.

Diluar itu, kepemimpinan di produk lewat organisasi sosial. Mereka bisa datang dari infrastruktur politik, interest group & pressure group. Kelompok pertama berbasis partai, sisanya ormas. Mekanisme rekrutmen pemimpin di internal partai memiliki pola relatif sama. Ada parpol yang bersandar pada sistem, tapi tak sedikit yang bersandar pada populisme figur. Sisanya mengintegrasikan keduanya, sistem dan figur

Mendorong Potensi Logistik

Meningkatnya gejala kekurangan pangan di sejumlah daerah dan Indonesia pada umumnya serasa mengganggu perasaan nasionalisme kita sebagai anak bangsa. Kekurangan beras pada kelas tertentu mendorong impor dari Pakistan, India, China, Thailand dan Vietnam. Data BPS menunjukkan bahwa kebutuhan beras tahun 2017 setidaknya sebanyak 2000 ton dengan nilai sebesar US\$ 1,08 juta. Ironisnya, surplus beras dalam negeri akibat kelaikan iklim dalam tahun tersebut telah menghilangkan optimisme petani dan pemerintah daerah atas kesediaan logistik yang relatif cukup untuk menyuplai daerah-daerah yang dianggap mengalami kekurangan beras dan gagal panen.

Daerah-daerah surplus beras itu justru berada di wilayah potensial seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Para kepala daerah di wilayah itu dengan percaya diri bahkan menjanjikan upaya mendistribusikan surplus beras ke wilayah yang membutuhkan di seluruh tanah air. Ini dapat dilihat dari semangat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (Syahrul Yasin Limpo & Muhammad Zainal Majdi) dalam satu kesempatan pidato bahkan dihadapan kepala negara.

Politik Otonomi Pasca Omnibus Law

Pasca pengesahan kebijakan *Omnibus Law* (UU Cipta Kerja), politik otonomi daerah dipertanyakan Kembali. Paling tidak pada soal keseriusan dan konsistensi segenap *stakeholders* (Djohan, 2020). Kesulitan menjawab pertanyaan semacam itu sebab teknisnya karena ketiadaan draft yang otentik, kekosongan instrumen organiknya, serta terbatasnya sumber primer kecuali saripati *power point* yang disuguhi di media sosial oleh satu dua pejabat terkait. Dengan epistemologi seadanya, ditambah *policy brief* kawan-kawan UGM, draft RUU OLCK setebal 905 halaman, serta menyimak dialektika diberbagai kanal, penting untuk mendiskusikan kembali nasib politik otonomi daerah dimasa kini dan akan datang. Dengan begitu seluruh niat baik pemerintah dapat ditangkap sebagai satu peluang, bukan sekedar sikap reaktif yang minim refleksi, atau perilaku narsis sejumlah orang ketimbang perasaan peduli pada masalah tata kelola pemerintahan.

Secara umum mesti diakui bahwa politik otonomi dalam kerangka *omnibus law* mengalami relaksasi. Kendatipun kritik sejumlah pakar bahwa gejala resentralisasi terbentuk secara sistemik dalam *beleid* itu, namun dalam cara pandang sebaliknya penting pula untuk direnungkan. Misalnya, sejauh manakah implementasi otonomi daerah memberi dampak positif

Kepalsuan dan Mal-administrasi

Di negara seluas dan sebesar ini isu kepalsuan bukanlah hal baru. Sejak munculnya kesaksian palsu, wajah palsu, nama palsu, rambut palsu, KTP palsu, vaksin palsu hingga kewarganegaraan palsu. Isu terakhir tentu saja mengejutkan karena mendera pejabat setingkat menteri. Dijaman orde baru sulit meloloskan pejabat palsu sebab mekanisme rekrutmen penuh jejaring yang berliku-liku seperti litsus, alias Penelitian Khusus. Mekanisme ini efektif tidak saja bertujuan menguliti latar belakang kehidupan seorang calon pejabat dari level Rukun Tetangga sampai nenek moyang dua tingkat di atasnya, juga untuk memperoleh kesejatian seseorang sebagai warga negara Indonesia tulen, bukan blasteran apalagi palsu. Maklum, selain untuk memperoleh yang terbaik dari yang baik (*primus inter pares*), rezim otoriter waktu itu *phobi* pada sisa-sisa komunisme. Sebab itulah para pejabat yang terpilih setidaknya diyakini berasal dari keturunan asli orang Indonesia, baik menurut garis kelahiran (*ius soli*) maupun menurut garis keturunan (*ius sanguinis*).

Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal, bukan ganda (*bipatride*) apalagi sampai ganda campuran. Persoalannya, bagaimanakah hal ini dapat terjadi di jaman yang justru semuanya dapat digelegah lewat teknologi canggih. Kalau dulu

Dialektika Ilmuan di Media Sosial

Dialektika dalam media sosial pada dasarnya menunjukkan sinyal tumbuhnya pengetahuan. Apalagi jika yang berdiskusi sekelompok ilmuan, bukan sebangsa haters, demonstran, atau barisan sakit hati. Bila itu, yang muncul hanya koleksi caci dan umpat, pengumpul kerikil panas, dan pengipas api dendam. Oleh sebab dosen secara normatif adalah ilmuan, wajar jika ragam perspektif muncul dari *lobus frontalis* otaknya sebagai bahan argumentasi. Bila deskripsi argumen dipenuhi data dan fakta artinya ilmuan mendasarkan pada analisis *empirical based*. Disisi lain, bila deskripsi diurai abstraktif lewat analisis teoritik dan bangunan konseptual, ilmuan meletakkan pendekatan *rasional based* sebagai gaya penalaran. Dua sistem berpikir itu jamak dimana saja, apalagi bila keduanya diintegrasikan dengan positivisme dan intuisi, lengkap sudah. Didalam ilmu sosial, setiap konklusi bersifat sementara sampai ditemukan kebenaran berikutnya.

Relativitas itu selalu diklarifikasi, bahkan diruang publik yang padat opini seperti *group whats up*. Lebih lagi bila sifatnya transedental semacam isu agama. Kata Sobary (2002), agama bukan milik para rohaniawan, juga bukan monopoli orang-orang yang memegang ijazah sekolah agama. Bila selama ini ada lembaga yang oleh banyak pihak dianggap memiliki otoritas

Corona dalam Persepsi Awam

Diruang publik, persepsi masyarakat terhadap pandemi rupanya bervariasi. Dalam wawancara acak presiden di depan Istana, arus bawah menyimpulkan bahwa kita sesungguhnya sedang berhadapan dengan serbuan iblis (Rabu, 30 Sept 2020). Corona dalam kesan awam adalah iblis yang tak terlihat secara kasat mata. Bagi mereka, selain Tuhan dan Malaikat yang bersifat gaib, semua yang mengganggu manusia adalah makhluk halus, jin dan sebangsanya. Kesadaran budaya semacam itu melahirkan cara beradaptasi kelompok *grassroots* lewat mantra dan doa. Persepsi itu diametral dengan pandangan kelompok rasional yang berpijak pada sains adalah makhluk micro-biologis bernama *corona virus disease* (covid 19).

Situasi dewasa ini secara eskatologi perlu ditangani serius, bukan sekedar memenuhi standar penggunaan masker, *social distancing*, dan cuci tangan (Alfayadi, 2020). Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan pragmatis kaum industrialis atas nama pertumbuhan ekonomi. Masker dan desinfektan tentu akan menjadi barang paling laris dengan memanfaatkan moment pesta demokrasi tingkat local semacam pilkada. Persis penjual asongan memanfaatkan kemacetan di jalan tol.

Dalam jangka panjang penting untuk sesegera mungkin menciptakan anti-virus agar angka infeksi tak melaju ibarat deret

Membaca Kontradiksi Pemerintahan

Catatan Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute tentang *Man of Contradictions-Joko Widodo and The Struggle to Remake Indonesia* (Sept 2020), menarik untuk dicermati. Buku setebal 180 halaman itu tak hanya mendeskripsikan keberhasilan Jokowi sebagai Pembuat Mebel menangkap imajinasi bangsa Indonesia, juga kemampuannya bertarung mendamaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Pada konteks pertama Ben menjelaskan bagaimana Jokowi merealisasikan mimpi-mimpi ekonominya, memosisikan dirinya di tengah transisi demokrasi dan otoritarianisme serta pergaulan internasional. Seluruh modal politik tersebut telah mengantar Jokowi ke putaran selanjutnya sebagai presiden.

Menariknya kata Ben, sekalipun makna kontradiksi diintrodusir sebagai hal yang tidak selalu negatif, namun tekanan pada kalimat memudarnya janji-janji politik, pembangunan dinasti politik, serta pelemahan lembaga anti korupsi yang merespon demonstrasi mahasiswa, setidaknya menyempurnakan sisi positif dan negatif kepemimpinan setiap rezim. Meneruskan penilaian Ben, kontradiksi itu pun semakin terlihat ketika ujian pandemi melanda. Ia dianggap tak menghargai pendapat para pakar kesehatan, tak percaya dengan gerakan masyarakat sipil, serta gagal membangun strategi terpadu. Sedemikian kompleks

Rekonstruksi Sejarah Pemerintahan

Kata Winston Churchill, *history has been written by the victors*. Faktanya pemenang cenderung mengubah, memanipulasi, bahkan menghilangkan artefak sejarah melalui berbagai cara termasuk politik dinasti. Sejarah penting untuk menuntun kita kearah yang lebih maju tanpa melupakan setiap peristiwa dimasa lampau. Jika kita sepakat, sejarah dapat dipelajari sebagai seperangkat ilmu pengetahuan (istoria, ilmu). Efeknya, tercipta spirit guna membangun identitas kultural suatu bangsa. Tanpa sejarah sebagai jejak pijak masa lalu dan kini, kita kehilangan kompas untuk meraih masa depan. Dengan kesadaran itu sejarah mesti dipelajari bukan semata-mata atas waktu dan lokus peristiwa. Jauh lebih penting belajar dari sejarah itu sendiri (Ndraha, 2002). Bila tidak, kita hanya meninggalkan memori tentang Perang Aceh atau Perang Diponegoro, tanpa pemahaman *setting social* yang melatar-belakangi perang hebat dimasa itu.

Dalam konteks sejarah pemerintahan, tak banyak historiografi yang mendeskripsikan bagaimana pola kepemimpinan dan tingkah laku masyarakat serta interaksi sosial pada satu entitas pemerintahan. Kalaupun ditulis, lebih semacam sejarah umum yang menyisakan sub bab tentang dinamika pemerintahan di lokasi peristiwa. Ambil contoh perilaku

Implikasi Teknologi Informasi

Kecepatan di level infrastruktur (masyarakat) dalam memanfaatkan kemajuan teknologi lewat berbagai aplikasi semacam *Grab*, *Uber* maupun *Go Ojek* tampak seperti mendahului kemajuan berpikir ditangga suprastruktur (pemerintah). Personifikasi negara yang terjebak dalam kemacetan lalu lintas soal debat pengaturan transportasi yang dinilai ilegal lewat penggunaan teknologi informasi itu tentu saja Kementerian Informasi dan Kementerian Perhubungan. Satu tingkat dibawah itu terdapat Pemerintah DKI Jakarta yang menjadi lokus bagi mobilitas transportasi legal dan yang dinilai ilegal.

Dalam Indonesia *Lawyer Club* (ILC) yang ditayangkan 15 Maret terlihat sejumlah *stakeholders* duduk bersama mendiskusikan kegelisahan pengusaha transportasi legal dan yang dianggap ilegal, sopir taxi dan pengguna aplikasi, pemerintah, penanggungjawab layanan konsumen, ahli hukum, budayawan hingga penikmat layanan dalam hal ini perwakilan masyarakat. Penting mencatat masalah ini karena berkaitan langsung pada dua variabel yang menjadi konsentrasi *kybernologi* (ilmu pemerintahan) yaitu disatu pihak mereka yang memerintah dan dilain pihak mereka yang diperintah.

Kualitas relasi itu tentu saja ditentukan oleh dua hal mendasar yaitu seberapa jauh penggunaan kewenangan oleh

Tantangan Revolusi Industri

Spirit revolusi industri 4.0 kini mendorong perubahan diberbagai sektor, tak terkecuali industri pendidikan kedinasan seperti IPDN yang menanggung cita-cita hitoris dan luhur yaitu menciptakan sosok pengintegrasi bangsa, Pamongpraja Muda (PPM) dengan seperangkat pengetahuan intelektual, skill dan attitude. Dengan menggunakan pola pendekatan konsentrik pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, IPDN sejauh ini telah berjalan dengan segudang prestasi yang ditorehkan alumnusnya dari daerah hingga pusat. Ditengah spirit revolusi industri itu, pertanyaan pentingnya apakah existing alumnus mampu menjawab tuntutan pemerintahan dan masyarakat dimasa akan datang? Pertanyaan itu tentu saja sekaligus mengandung peluang dan tantangan.

Peluang dapat berjalan dan berbaris rapi dengan laju revolusi industri. Sementra tantangan hendaknya memberi kita kekuatan untuk mempersiapkan diri menghadapi peluang dimaksud. Disisi lain peluang memang terbuka lebar tetapi tantangan pun bukan sedikit. Salah satu peluang yang diberikan bagi IPDN adalah diakui sebagai perguruan tinggi kedinasan dengan status institut dibanding pendidikan kedinasan lain yang dipaksa menjadi politeknik. Tantangan terbesar kita dgn realitas hari ini adalah bagaimana merekonstruksi kembali sosok ideal

Restrukturisasi dan Refungsionalisasi

Melanjutkan Webiner tanggal 21 Mei 2020 bertajuk di atas, saatnya kita meramu dialektika tersebut ke tataran yang lebih konkrit yaitu penataan organisasi pendidikan Pamong. Tentu saja hal-hal penting yang akan mengemuka adalah apa tujuannya, apa problematikanya, apa landasan teoritik dan normatifnya, apa prinsip-prinsip penting yang mesti diperhatikan, serta struktur seperti apakah yang sebaiknya dirancang untuk pada akhirnya dikompromikan. Pertanyaan lebih jauh adalah apakah kita hanya akan menambal sulam atas kondisi existing hari ini, atautkah kita akan merombak total struktur organisasi pendidikan Pamong yang dalam berbagai perspektif tak relevan lagi oleh perubahan sistem.

Tujuan penataan organisasi pendidikan Pamong tentu saja tak lepas dari upaya penyesuaian atas problem internal dan eksternal yang dihadapi pasca 26 angkatan terakhir. Ini diluar sejarah berdirinya pendidikan Pamongpraja pada tahun 1956 dengan nama Osvia, Mosvia, KDC, APDN, IIP oleh Soekarno, STPDN era Soeharto (1992) dan IPDN di masa SBY (2004). Tujuan pendidikan pendidikan Pamongpraja dimasa lalu jika ditelisik dari buku Kenang-Kenangan Pangrehpraja Belanda (1920-1942) oleh S.L. Van Der Wal lewat pengantar Rosihan Anwar setebal 386 hal (Penerbit Djambatan, 2001).

Menguji Eksistensi BPIP

Seperti sengatan arus listrik, ruang publik kembali gaduh oleh ya Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP). Draft setebal 9 bab dengan 60 pasal itu tidak saja mengundang polemik pada substansi, juga pertimbangan yuridisnya seakan mencoba melupakan TAP MPRS XXV Tahun 1966 yang pernah ditetapkan melalui TAP MPR No.1/2003 terkait isu paling sensitif komunisme. Konsensus itu sebenarnya memperlihatkan itikad baik pemerintah untuk menghentikan indikasi kebangkitan idiologi komunisme hari ini dan dimasa mendatang.

Mengintip catatan rapat panja di Senayan, pemerintah telah memberi respon kuat terhadap sejumlah pasal bermasalah. Diantaranya gagasan Soekarno yang menarik benang merah kelima sila menjadi trisila dan ekasila. Perasan dimaksud berakhir pada esensi penting Pancasila, gotong-royong. Ini dianggap mengecilkan dimensi spiritualitas yang justru diyakini melandasi empat sila yang lain. Bila dimasa kekunoan konsep gotong-royong dianggap sebagai akar sosialisme Hatta (1945), di era kekinian disimpul sebagai elemen dasar *good governance* (Pranowo;2010, Suroatmojo;2015).

Dimasa tumbuh-kembangnya, meski Pancasila dianggap final, namun sebagai satu idiologi tetap terbuka dan fleksibel

Tantangan Paradigma New Normal

Sejak 1962, Thomas Samuel Khun mencatat periode kejatuhan sains dari waktu ke waktu. Einstein menggeser konsep fisika Newton, temuan oksigen oleh Lavoisier menumbangkan ide awal *phlogiston*. Di lain waktu eksperimen Galileo mengubur mimpi Aristoteles bahwa benda jatuh dengan laju yang sepadan bobotnya. Kritik Khun dalam buku populernya *The Structure of Scientific Revolutions* menjadi pijakan kuat tentang apa yang kita sebut paradigma. Suatu pola dasar dalam pemecahan masalah. Paradigma diasumsikan sebagai pandangan dasar yang menjadi rujukan manusia pada waktu tertentu sebagai satu metode pendekatan (*normal science*). Inilah sejarah sains yang diawali Auguste Comte tentang *positivisme* dan Karl Raimund Popper soal falsifikasi hingga disintesis kembali oleh Khun.

Keadaan normal pada waktu tertentu dapat mengalami gejala anomali, satu kondisi dimana paradigma yang selama ini diyakini sebagai metode pemecahan masalah tak cukup *compatible* menyelesaikan problem yang dihadapi. Dalam batasan lain, anomali adalah suatu kondisi dimana manusia berada dalam keraguan antara ketidak-relaan melepas budaya lama ketika berhadapan dengan budaya baru yang suka atau tidak mesti diterima (Hamdi, 2002). Andai sains-budaya meninggalkan artefak busana yang dirajut sesuai keyakinan sepuluh tahun lalu,

Keistimewaan Pamongpraja

Dimasa Dinasti Han dan Qin berkuasa (206-220/221-206 SM), pola rekrutmen birokrasi dilakukan dengan dua cara, yaitu sumber birokrat berasal dari kalangan istana (*political appointments*) dan yang berasal dari luar istana. Keluarga raja biasanya mengisi struktur inti dan garis komando. Masa kerjanya seumur hidup, *privilage*, dididik khusus dan masa kerjanya tergantung kebutuhan Raja. Kelompok kedua direkrut dari luar istana sebagai birokrasi *outsider*. Birokrasi level dua ini ditentukan batas usia, durasi kerja, profesionalitas, senioritas, gaji, dan kompensasi. Inilah dasar merit system yang dikembangkan saat ini melalui variabel *based loyalty* dan *based achievement* sampai pada perangkungan (Thoha; 2009, Agus; 2020).

Pada masa Napoleon Bonaparte berkuasa (1769-1821), dia melakukan rekrutmen di birokrasi militer melalui dua model, yaitu mengangkat perwira dari kelompok bangsawan dengan pendidikan istimewa. Mereka duduk di posisi elite sampai batas tertentu. Ketika banyak perwira tewas pasca perang Mesir, Napoleon mengangkat calon perwira baru dari masyarakat biasa untuk mengisi posisi tsb. Inilah posisi kedua yang dapat diangkat dan diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan *merit system* yang ketat. Ini pula mendorong terbentuknya Akmil di seluruh dunia (Said, 2005).

Evolusi Manusia Pasca Pandemi

Manusia adalah satu dari empat anggota *homo sapiens* yang paling sukses mempertahankan genetiknya di alam ini. Simpanse, Gorila dan Orang Utan adalah anggota *family* yang masih tersisa dan terancam punah. Itupun tak lebih karena belaskasih saudara sepupunya (manusia). Tanpa suaka, kemungkinan ketiga spesies itu benar-benar hanya dapat ditemukan di museum. Dinosaurus adalah buktinya. Sementara Kucing dan Anjing adalah contoh dua spesies yang paling mampu merayu manusia untuk hidup berdampingan dalam jangka panjang lewat proses domestikasi (Noah, 2019). Sejauh ini manusia adalah spesies teratas dalam susunan ekosistem. Sejumlah spesies yang gagal bersimbiosis dengannya menjadi sejarah. Boleh dikatakan seluruh kendali populasi praktis berada di tangan spesies paling bijaksana, *homo sapiens*.

Kini kendali terhadap populasi paling rasional di planet ini mulai diragukan, kalau tidak dipertanyakan. Akankah manusia tetap bertahan ditengah ancaman *micro-biologis* penuh lemak dalam jutaan sel yang menyerang masif, latent dan *softly*. Manusia sebagai spesies yang pernah membuktikan dirinya paling berjaya selama jutaan tahun itu seakan tak sanggup melakukan apa-apa kecuali berdiam dirumah. Di tengah keputusan itu kaum agamis yakin tak lebih dari ujian Tuhan, sementara kaum

Ibukota Negara, Administratif atau Otorita?

Dilema penetapan status ibukota negara apakah administratif atau otorita kemungkinan disebabkan oleh pertimbangan efisiensi, efektivitas, stabilitas, perlakuan, maupun pengembangan wilayah dimasa mendatang. Sejumlah aspek itu umumnya dimaknai sebagai hal berbeda hingga perlu diperlakukan secara afirmatif, apalagi sebagai ibukota negara. Hal yang sama dapat dilihat pada sejumlah kota seperti Kuala Lumpur, Manila, Canberra, Washington DC, Paris, Tokyo, Seoul dll. Kota-kota itu tentu memiliki kekhususan tersendiri sebagai konsekuensi selaku ibukota negara. Kekhususan itu bergantung kepentingan negara terhadap ibukota sebagai beranda utama sekaligus simbol negara. Bagaimana dengan ibukota baru di negara kita?

Sebelum menjawab hal itu, pertanyaan pokoknya adalah, apakah cara yang digunakan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah? Jawaban teoritis yang umum dipakai para ilmuwan pemerintahan adalah cara dekonsentrasi, desentralisasi, delegasi dan privatisasi (Rondinelli & Chema, 1983). Desentralisasi tampak dalam penyerahan urusan dari pemerintah ke daerah yang mencipta daerah otonom. Delegasi adalah lembaga semi pemerintah (quasi government) yang memiliki otoritas mengerjakan suatu urusan pemerintah

Konsekuensi Otorita di Ibukota Nusantara

Perdebatan status ibukota negara kini memasuki tahap baru pasca ditetapkan sebagai *beleid* ibukota negara. Isu atas sejumlah teks berubah menjadi batasan dalam ketentuan umum. Misalnya saja otorita, bukan daerah administratif. Ibukota bukan semata relokasi episentrum pemerintahan, juga negara. Bedanya, Sejong yang menghabiskan 289 triliun sebagai pusat pemerintahan, Seoul tetap Ibukota Korea Selatan. Putrajaya menghabiskan 117 triliun sebagai pusat pemerintahan, tetap saja Kualalumpur Ibukota Malaysia (Berawi, 2022). Bandingkan dengan rencana 466 triliun untuk persiapan Ibukota Nusantara (Bappenas, 2022).

Otorita dalam konteks itu bersifat spesial dan sentralistik. Spesial berisi wewenang pemerintah untuk mengatur ibukota negara. Pejabatnya *top down* yang ditunjuk sesuai kebutuhan. Semua kriteria bergantung prerogatif pemerintah. Tak ada arus *bottom up* berbasis komunitas, apalagi otonomi. Semua serba koordinasi dan atas nama pemerintah. Pendek kata pejabatnya setingkat menteri yang membantu presiden di bidang Otorita Ibukota Negara. Dengan bentuk otorita itu, artinya cara menyelenggarakan pemerintahan bersifat delegasi (Rondinelli 1985, Manan, 2001, Suwandi, 2004). Otorita jelas berbeda dengan status daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 amandemen ke 4. Konstitusi

Status Jakarta Pasca Relokasi

Pasca lahirnya undang-undang Ibukota Negara (UU Nomor 3/2022), status Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus Ibukota Pemerintahan selesai. Pertanyaannya, status seperti apakah yang ideal juga realistis bagi Jakarta di hari-hari mendatang? Sebagai daerah tanpa predikat Ibukota Negara, Jakarta mesti diposisikan kembali apakah sebagai daerah khusus tertentu ataukah daerah otonom biasa. Konteks kekhususannya dimana, dan bilapun menjadi daerah biasa, apa konsekuensinya?

Kedua pilihan tersebut tentu memiliki implikasi yang mesti di takar sungguh-sungguh sebagai upaya mengeluarkan Jakarta dari masalahnya, bukan membiarkan Jakarta dengan beban baru. Kesalahan mengubah status Jakarta dapat menjadi preseden buruk atas kehendak memaksa relokasi Ibukota Negara. Mengubah status Jakarta sebagai daerah khusus atau bukan tentu tinggal merevisi UU 27/2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI sebagai Ibukota Negara. Beda dengan Korea Selatan dan Malaysia yang hanya memindahkan Ibukota Pemerintahan, bukan Ibukota Negara.

Menyadari karakteristik Jakarta yang kaya akan histori pergumulan politik, gravitasi ekonomi serta miniatur Indonesia, kita perlu merawat heritage tadi agar menjadi solusi. Mengingat sumbu politiknya bergeser, maka titik berat kekhususannya diarahkan ke aspek ekonomi dan sosial budaya. Kekhususan

TENTANG PENULIS



Muhadam Labolo, lahir di Pagimana Kabupaten Banggai Sulteng, 5 Agustus 1972. Dosen tetap pasca sarjana IPDN Jakarta. Lulusan STPDN tahun 1995, S1 Institut Ilmu Pemerintahan, S2-S3 Universitas Padjadjaran Bandung. Selain mengajar di almamaternya (Diploma, S1, Profesi, S2,S3), lebih dari seribu kali menjadi pembicara dihadapan DPRD dari Sabang sampai Merauke sejak tahun 2002. Pernah menjadi Lurah Teladan di Sulawesi Selatan, Mahasiswa Teladan di IIP, serta Dosen Favorit di almamaternya. Memiliki lebih dari 20 buku dan 200 tulisan di blog perpektif pemerintahan. Menulis artikel diberbagai media sosial. Melakukan studi banding di Asia dan Eropa. Pernah menjadi Pemred Jurnal Widyapraja, Kapus, Wakil Dekan, dan Dekan Fakultas Politik Pemerintahan (2018-2020). Ketua Asosiasi Dosen IPDN, Anggota MIPI dan AIPI, serta Ketua Paguyuban Angkatan Kosong Empat Indonesia (PASOP4TI).



Muhammad Riqqo Khadafi, lahir di Belinyu Kabupaten Bangka, 5 April 1996. Bertugas pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, sebelumnya berkesempatan mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lulusan IPDN tahun 2018 dengan jurusan kebijakan pemerintahan. Sembari menjalankan tugas dan pengabdian, melanjutkan pendidikan strata 2 pada Universitas Bina Insan dan lulus pada tahun 2021. Sejak tahun 2016 telah aktif menulis serta menjadi konsultan pemerintahan dan kebijakan publik.